JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

OPTIMALISASI PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN WILAYAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG

Zainul Arifin[1], Agus Subagyo[2], Agustina Setiawan[3]

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Optimalisasi tata kelola pemerintahan pada tingkat kecamatan menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Camat sebagai perangkat daerah memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Namun demikian, berbagai persoalan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital masih menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat memiliki peran strategis sebagai koordinator pemerintahan wilayah, fasilitator pembangunan, mediator kepentingan masyarakat, sekaligus penggerak pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi peran tersebut mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan Camat, kapasitas kelembagaan, sinergi antarpemangku kepentingan, serta tingkat literasi masyarakat terhadap program pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya integrasi sistem pelayanan digital menjadi faktor penghambat utama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Camat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, tetapi harus dikembangkan melalui model kepemimpinan kolaboratif berbasis good governance, transformasi digital, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah secara adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan perkotaan.

Kata Kunci : Peran Camat, *Good Governance*, Efektivitas Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola Pemerintahan.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Abstract

Effective regional governance at the sub-district level constitutes an essential prerequisite for achieving participatory, transparent, accountable, and responsive local government administration. As the head of the sub-district administration, the Camat plays a strategic role in coordinating governmental affairs, public service delivery, regional development, and community empowerment within the framework of good governance. Nevertheless, several challenges remain, including limited community participation, inadequate institutional capacity, weak intergovernmental coordination, and insufficient digital transformation.

A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, documentation, and literature review. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. Data credibility was ensured through source triangulation, methodological triangulation, and member checking.

The findings indicate that the Camat performs a strategic function as a regional coordinator, development facilitator, public service leader, and community empowerment catalyst. The optimization of this role contributes significantly to strengthening institutional coordination, improving public service quality, enhancing bureaucratic capacity, promoting digital governance, and increasing citizen participation in local development planning. Furthermore, successful community empowerment depends on collaborative leadership, institutional capacity, stakeholder collaboration, and public awareness. Conversely, limited human resources, low community participation, and fragmented digital service integration remain major constraints.

This study concludes that optimizing the role of the Camat requires a collaborative governance approach integrating participatory leadership, institutional strengthening, digital transformation, and sustainable community empowerment to improve effective, adaptive, inclusive, and accountable regional governance.

Keywords : Sub-District Head, Good Governance, Regional Governance, Community Empowerment, Public Administration.

PENDAHULUAN

Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia telah mendorong perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem yang bersifat sentralistik menuju tata kelola yang desentralistik, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui kebijakan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Dalam perspektif administrasi publik modern, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperkuat demokrasi lokal, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

pelayanan publik. Paradigma tersebut selaras dengan konsep *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP (1997), yang menempatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, kesetaraan, dan supremasi hukum sebagai prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, efektivitas tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada struktur pemerintahan daerah, kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan pemerintahan kelurahan sekaligus menjadi unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan masyarakat. Kedudukan tersebut menempatkan Camat tidak hanya sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin wilayah yang bertanggung jawab membangun koordinasi antarlembaga, memperkuat sinergi pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan inovasi pelayanan publik, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya kompleksitas persoalan perkotaan, serta semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut pemerintah kecamatan untuk mengembangkan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Kecamatan Sumur Bandung sebagai salah satu kawasan strategis di Kota Bandung memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sebagian besar kecamatan lainnya. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi, wilayah ini memiliki tingkat mobilitas

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

masyarakat yang tinggi serta dinamika pelayanan publik yang lebih kompleks. Kondisi tersebut menuntut Camat untuk mampu menjalankan fungsi koordinasi secara efektif sekaligus membangun kolaborasi dengan pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah.

Dalam perspektif *collaborative governance*, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kerja sama dengan berbagai aktor pembangunan. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif berperan penting dalam membangun kepercayaan, komitmen bersama, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) juga menegaskan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan karena mampu memperkuat kapasitas sosial, meningkatkan legitimasi kebijakan publik, serta mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas efektivitas pelayanan publik, implementasi kebijakan daerah, reformasi birokrasi, atau pemberdayaan masyarakat secara terpisah. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan peran strategis Camat, pemberdayaan masyarakat, dan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas, khususnya pada konteks pemerintahan kecamatan di wilayah perkotaan. Selain itu, sebagian besar penelitian masih memandang Camat sebagai pelaksana fungsi administratif, sementara dimensi kepemimpinan kolaboratif dalam mewujudkan *good governance* belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengintegrasikan teori desentralisasi, *good governance*, dan *collaborative governance* untuk menganalisis bagaimana optimalisasi peran Camat melalui pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan hubungan konseptual antara kepemimpinan Camat, pemberdayaan masyarakat, dan efektivitas tata kelola pemerintahan sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Camat dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis optimalisasi peran Camat dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kepemimpinan Camat, proses pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumur Bandung dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, kepala seksi, lurah, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terlibat dalam berbagai program pemberdayaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai.

PEMBAHASAN

Optimalisasi Peran Camat dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Kecamatan Sumur Bandung menjalankan peran yang bersifat multidimensional dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Peran tersebut tidak lagi terbatas pada pelaksanaan fungsi administratif sebagaimana diamanatkan dalam

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

peraturan perundang-undangan, tetapi berkembang menjadi fungsi kepemimpinan strategis yang mencakup koordinasi pemerintahan, pengendalian pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek struktural birokrasi, melainkan juga oleh kapasitas kepemimpinan Camat dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara empiris, penelitian menemukan bahwa Camat mampu membangun koordinasi lintas sektor melalui forum koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat. Mekanisme koordinasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik yang membutuhkan keterlibatan lebih dari satu organisasi. Dengan demikian, koordinasi yang dilaksanakan Camat menjadi instrumen penting dalam menciptakan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai keberhasilan birokrasi menjalankan prosedur administratif. Sebaliknya, efektivitas lebih ditentukan oleh kemampuan organisasi publik menghasilkan pelayanan yang responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Sumur Bandung, kepemimpinan Camat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan koordinasi antarlembaga sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terpadu. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi koordinatif memiliki posisi yang sangat penting dalam mengurangi fragmentasi birokrasi yang selama ini menjadi salah satu kendala penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam perspektif teori desentralisasi, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Rondinelli (1981) yang menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah kecamatan untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal secara lebih akurat serta mengembangkan solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Camat Kecamatan Sumur Bandung tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah kota, tetapi juga

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

berperan sebagai aktor yang mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program-program yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, tetapi juga oleh kapasitas institusi lokal dalam mengelola kewenangan tersebut. Dengan kata lain, desentralisasi baru akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang mampu membangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Camat berperan sebagai local *governance manager* yang menghubungkan kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat melalui mekanisme koordinasi yang berkelanjutan.

Dari perspektif *good governance*, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sumur Bandung tercermin melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. UNDP (1997) menempatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum sebagai prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi prinsip-prinsip tersebut mulai terlihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, khususnya melalui koordinasi pembangunan, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta komunikasi antara pemerintah kecamatan dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi *good governance* belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya aparatur, belum meratanya kualitas pelayanan antarunit kerja, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum konsisten pada setiap program pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *good governance* merupakan proses yang bersifat dinamis dan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas tata kelola pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen pemimpin, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan Camat memiliki karakteristik kolaboratif. Camat tidak hanya menjalankan fungsi komando dalam birokrasi, tetapi

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

juga berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai kepentingan organisasi perangkat daerah, pemerintah kelurahan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat. Pola kepemimpinan tersebut memperkuat kemampuan pemerintah kecamatan dalam membangun kesepahaman terhadap tujuan pembangunan wilayah sehingga berbagai program dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), yang menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh kemampuan pemimpin membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama, dialog yang konstruktif, dan pembelajaran bersama di antara para pemangku kepentingan. Di Kecamatan Sumur Bandung, keberhasilan koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat telah berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat hubungan antaraktor pemerintahan. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh variasi kapasitas organisasi dan tingkat komitmen masing-masing pemangku kepentingan, sehingga keberhasilan kolaborasi belum sepenuhnya merata pada seluruh bidang pelayanan.

Temuan tersebut juga memiliki kesesuaian dengan model *Collaborative Governance Regime* yang dikembangkan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dipengaruhi oleh interaksi antara dinamika kolaborasi, kapasitas kelembagaan, serta konteks sistem pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, dinamika kolaborasi di Kecamatan Sumur Bandung berkembang melalui komunikasi yang relatif intensif antara pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Akan tetapi, keberlanjutan kolaborasi tersebut masih memerlukan penguatan kapasitas organisasi, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi.

Apabila dibandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai pemerintahan kecamatan di Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada efektivitas pelayanan administrasi atau implementasi kebijakan publik, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan wilayah merupakan hasil interaksi antara kepemimpinan, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai peran Camat yang tidak lagi diposisikan sebagai administrator pemerintahan semata, tetapi sebagai pemimpin kolaboratif yang memiliki kemampuan membangun jaringan kerja antarpemangku kepentingan.

Temuan tersebut sekaligus memperkuat konsep *public value* yang dikembangkan Moore (1995). Menurut Moore, organisasi publik dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan nilai publik melalui pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai publik pada tingkat kecamatan tidak hanya dihasilkan melalui pelayanan administrasi yang cepat dan efisien, tetapi juga melalui peningkatan kepercayaan masyarakat, penguatan partisipasi publik, serta terciptanya koordinasi pembangunan yang lebih efektif. Dengan demikian, keberhasilan Camat tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian target administratif, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menciptakan nilai sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menghasilkan sintesis bahwa optimalisasi peran Camat merupakan determinan utama dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah. Kepemimpinan yang adaptif, kemampuan membangun koordinasi lintas sektor, penguatan komunikasi dengan masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pemerintahan kecamatan pada era desentralisasi memerlukan model kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan birokrasi, tetapi juga pada penciptaan kolaborasi, inovasi, dan nilai publik sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Peran Camat dalam Perspektif Kepemimpinan Pemerintahan Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Kecamatan Sumur Bandung menjalankan fungsi yang melampaui peran administratif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa Camat berperan sebagai koordinator pemerintahan, fasilitator pembangunan, mediator kepentingan antaraktor, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Peran tersebut tercermin dari kemampuan Camat membangun koordinasi lintas perangkat

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

daerah, memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik, serta mengonsolidasikan dukungan pemerintah kelurahan dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan pada tingkat kecamatan tidak lagi bergantung semata-mata pada struktur birokrasi formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan dalam membangun sinergi kelembagaan.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya transformasi paradigma kepemimpinan pemerintahan dari pendekatan birokrasi tradisional menuju kepemimpinan kolaboratif (collaborative leadership). Dalam paradigma birokrasi konvensional, keberhasilan organisasi publik umumnya diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur administratif dan hierarki organisasi. Namun, kompleksitas persoalan pemerintahan daerah, khususnya pada kawasan perkotaan seperti Kecamatan Sumur Bandung, menuntut pola kepemimpinan yang lebih adaptif, komunikatif, dan mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai aktor pembangunan. Oleh karena itu, kemampuan Camat dalam membangun komunikasi lintas sektor menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah.

Dari perspektif teori desentralisasi, temuan penelitian ini memperkuat pandangan Rondinelli (1981) yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif. Dalam konteks Kecamatan Sumur Bandung, kewenangan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi administratif, tetapi juga melalui kemampuan Camat menerjemahkan kebijakan pemerintah kota menjadi program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, efektivitas desentralisasi sangat ditentukan oleh kapasitas aktor lokal dalam mengelola kewenangan yang dimilikinya.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor yang dilakukan Camat berimplikasi terhadap meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari meningkatnya sinkronisasi program antarperangkat daerah, percepatan penyelesaian permasalahan masyarakat, serta meningkatnya kualitas komunikasi antara pemerintah dan warga. Temuan ini menguatkan konsep whole-of-government approach yang menyatakan bahwa persoalan publik tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata, tetapi memerlukan integrasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Apabila dibandingkan dengan penelitian Ansell dan Gash (2008), hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan (trust building), komitmen bersama, dan dialog antarpemangku kepentingan. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan tambahan bahwa pada tingkat pemerintahan kecamatan, faktor kedekatan sosial antara Camat dan masyarakat menjadi modal sosial yang mempercepat terbentuknya kolaborasi. Aspek ini belum banyak dibahas dalam penelitian Ansell dan Gash yang lebih berfokus pada kolaborasi antarorganisasi publik.

Selain itu, hasil penelitian juga memperluas konsep public value yang dikembangkan Moore (1995). Apabila Moore menekankan bahwa nilai publik dihasilkan melalui pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai publik pada tingkat kecamatan juga dibentuk melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan Camat tidak hanya diukur dari kualitas pelayanan administrasi, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi pemerintah, serta menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah merupakan hasil interaksi antara kepemimpinan kolaboratif, kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan modal sosial masyarakat. Oleh karena itu, peran Camat perlu diposisikan sebagai local *collaborative leader* yang tidak hanya mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga membangun ekosistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan wilayah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran Camat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan wilayah di Kecamatan Sumur Bandung. Peran Camat tidak lagi terbatas sebagai pelaksana fungsi administratif, tetapi berkembang menjadi pemimpin kolaboratif yang mampu mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, memfasilitasi pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang adaptif dan kemampuan

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

membangun koordinasi lintas sektor terbukti mampu menciptakan sinkronisasi kebijakan, mempercepat penyelesaian permasalahan masyarakat, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* telah berjalan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, koordinasi pembangunan, dan pelayanan publik. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur, belum meratanya kualitas pelayanan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum konsisten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi menjadi langkah strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat konsep desentralisasi, *collaborative governance*, *good governance*, dan *public value* yang menempatkan kepemimpinan kolaboratif sebagai faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Camat perlu diposisikan sebagai *local collaborative leader* yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mampu membangun sinergi antarlembaga, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan nilai publik yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6276

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.

Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences, 47*(2), 133–145.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.